

## Analisis Pengaruh Indeks Demokrasi Indonesia, Pengangguran, dan Gini Ratio Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara Tahun 2014-2022

Dedy Harianto Hutasoit<sup>1</sup> Armin Nasution<sup>2</sup> Elisabeth Saida Silaban<sup>3</sup> Ismi Hasanah<sup>4</sup>

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, Indonesia<sup>1,2,3,4,5</sup>

Email: [dedyhutasoit1@gmail.com](mailto:dedyhutasoit1@gmail.com)<sup>1</sup>

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh Indeks Demokrasi Indonesia, Pengangguran, dan Rasio Gini terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) selama 9 tahun, yaitu tahun 2014 sampai dengan tahun 2022. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) variabel Indeks Demokrasi Indonesia mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, (2) variabel Pengangguran mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, (3) variabel Rasio Gini mempunyai pengaruh positif namun signifikan terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi, dan (4) variabel Indeks Demokrasi Indonesia, Pengangguran, dan Rasio Gini secara bersama-sama berpengaruh terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi.

**Kata Kunci:** Indeks Demokrasi di Indonesia, Pengangguran, Gini Ratio, dan Ekonomi Tingkat pertumbuhan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

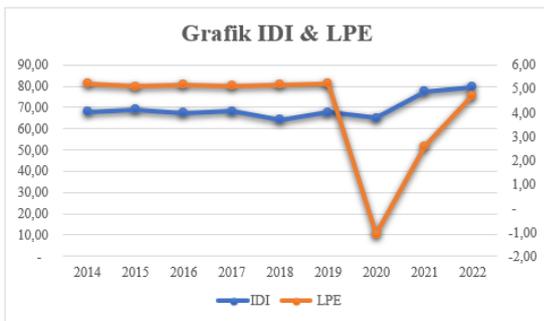
Pertumbuhan ekonomi digunakan untuk menggambarkan bahwa suatu perekonomian telah mengalami proses peningkatan dan mencapai taraf kemakmuran yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari produktivitas negara tersebut. Produktivitas negara merupakan jumlah barang dan jasa yang dapat dihasilkan oleh seluruh penduduk negara itu secara agregat. Dalam sebuah negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi memiliki karakteristik institusional yang baik, yang diukur menggunakan variabel, seperti; kebebasan ekonomi, tingkat korupsi yang rendah efisiensi peradilan, pemerintahan yang efektif dan perlindungan terhadap properti. Lebih jauh lagi, kebebasan ekonomi akan memberikan institusi yang baik bagi suatu negara. Sehingga, dengan kualitas institusi yang baik dapat memberikan efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Salah satu bentuk institusi adalah institusi politik. Mankiw (2000) dan Blanchard (2006) mengungkapkan bahwa perekonomian sebuah negara tidak akan terlepas dari peranan faktor politik. Kondisi politik yang aman dan stabil akan memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Institusi akan berperan sangat penting dalam menjaga kestabilan politik sehingga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Berbagai indikator juga muncul untuk mengukur bagaimana faktor politik memberikan pengaruh pada kondisi perekonomian suatu negara. Indikator-indikator tersebut antara lain; *property rights*, *pressure of redistribution*, dan *predatory dictator* (Drazen, 2000).

TAHUN	IDI	LPE	GR	PGR	TAHUN	IDI	LPE	GR	PGR
2014	68,02	5,23	0,321	390.710	2019	67,65	5,22	0,317	382.438

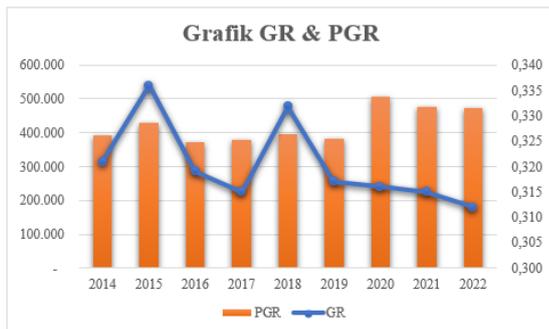
2015	69,01	5,10	0,336	428.794	2020	65,13	- 1,07	0,316	507.805
2016	67,37	5,18	0,319	371.680	2021	77,60	2,61	0,315	475.156
2017	68,08	5,12	0,315	377.288	2022	79,53	4,73	0,312	472.496
2018	64,33	5,18	0,332	396.027					

(Sumber BPS SUMUT)

Berikut Grafik perkembangan ke- empat variable dari tahun amatan 2014-2022 di provinsisumatera utara:



Dimana Indeks Demokrasi Indonesia dan Laju Pertumbuhan Ekonomi sebagai (Y) dalam penelitian ini mengalami fluktuatif.



Begitu juga dengan Pengggngguran dan Gini Ratio yang terjadi di provinsi sumatera utara tahun amatan 2014-2022 menunjukkan pergerakan yang fluktuatif. Dari tabel peringkat demokrasi versi the economist di atas dapat kita lihat perkembangan demokrasi Indonesia, hal itu dapat kita lihat dari terus meningkatnya rangking demokarsi Indonesia. Dari kategori penilaian demokrasi proses pemilu dan pluralisme, partisipasi politik dan kebebasan sipil terus mengalami peningkatan hal ini terjadi karena makin tingginya kesempatan dan kemudahan bagi masyarakat, para pelaku usaha, aktifis LSM, media untuk turut serta dalam pembangunan. Semakin tingginya tingkat pendidikan masyarakat juga ikut membeikan pengaruh pada partisipasi masyarakat untuk mengikuti kegiatan politik, baik dalam pemilu maupun hal-hal politik laiinya, meningkatnya parisipasi masyarakat dalam politik ini juga didukung semakin tingginya kebebasan bagi masyarakat untuk memilih dan dipilih, berkumpul dan berserikat. Hal ini menjadikan Indonesia mulai dipandang sebagai negara yg demokratis. Namun dari aspek budaya politik belum mengalami perkembangan. Fakta ini dapat kita lihat di dalam masyarakat Indonesia, dimana mayoritas masyarakat Indonesia menganut budaya politik yang bersifat parokial kaul di satu pihak dan partisipan di pihak lainnya. Hal lain yang mengganggu budaya politik adalah ikatan primordialisme yang masi kuat, politik balas jasa dan krisis keteladanan di tengah masyarakat.

Sejak tahun 2009 Indonesia menyusun pengukuran demokrasi yang disebut dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang disusun oleh BPS dan Bappenas. Sedabgkan metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitaif dan metode kualitatif. Metode kuantitatif

didapat melalui koding koran dan dokumen, sedangkan metode kualitatif melalui focus group discussion (FGD) dan wawancara mendalam terhadap narasumber. Indeks ini terdiri dari beberapa aspek pertama aspek kebebasan sipil, kedua aspek hak-hak politik dan yang terakhir aspek lembaga demokrasi. Pembangunan ekonomi pada dasarnya bertujuan untuk mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan, pengangguran dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun ketimpangan distribusi pendapatan dan pengangguran di Indonesia terkhususnya dalam penelitian ini di wilayah provinsi Sumatera Utara masih menjadi permasalahan utama yang perlu diatasi. Temuan secara empiris dari beberapa peneliti menunjukkan berbagai hasil yang kontroversi terkait masalah pengaruh ketimpangan distribusi pendapatan dan pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada satu sisi, ketimpangan distribusi pendapatan dianggap dapat menimbulkan ketegangan sosial dan situasi yang tidak kondusif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

### **Landasan Teori Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses pertumbuhan output per kapita dalam jangka panjang. Proses tersebut akan menghasilkan kekuatan bagi kelanjutan pertumbuhan periode selanjutnya (Boediono, 1994). Untuk mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi jangka panjang tersebut, pemerintah berusaha mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil, menghindari terjadinya resesi dan pertumbuhan ekonomi jangka pendek yang cenderung tidak berlangsung lama. Tingkat pertumbuhan ekonomi menyatakan kecepatan perekonomian suatu negara untuk berkembang secara menyeluruh. Pengukuran terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi sangat berguna agar terjadinya perubahan dalam keseimbangan. Tingkat pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai suatu perubahan terhadap persentase tahunan dari Produk Domestik Bruto (PDB) riil. Hal yang membedakan antara PDB nominal dan PDB riil adalah bahwa PDB nominal berhubungan dengan peningkatan harga-harga barang, sedangkan PDB riil berhubungan dengan peningkatan pada jumlah produksi (Parkin, 2010). PDB nominal merupakan nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi pada tahun tertentu dan dinilai berdasarkan harga pada tahun tersebut sedangkan PDB riil adalah nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi pada tahun tertentu dan dinilai atas harga tahun dasar.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses yang berkelanjutan dan diukur sebagai peningkatan jumlah PDB riil dalam periode tertentu. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi adalah persentase dari perubahan tahunan PDB riil. Untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi, digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Laju Pertumbuhan Ekonomi (G)} = \frac{\text{PDB Riil Th. Berjalan} - \text{PDB Riil Th. Sebelumnya}}{\text{PDB Riil Th. Sebelumnya}} \times 100$$

Laju pertumbuhan PDB riil (G) menunjukkan seberapa cepat perekonomian berkembang secara keseluruhan. Pengukuran laju pertumbuhan ekonomi ini bertujuan mengetahui keberadaan perubahan potensial keseimbangan kekuatan ekonomi antar negara. Dalam penelitian ini, pertumbuhan ekonomi diukur melalui laju pertumbuhan ekonomi sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi tersebut adalah Inflasi, Nilai Tukar, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK).

### **Indeks Demokrasi Indonesia**

Indeks Demokrasi Indonesia diinisiasi oleh Bappenas pada tahun 2008 yang bertujuan untuk mengetahui dan menilai secara reguler apakah kondisi demokrasi Indonesia bergerak menuju negara demokrasi atau justru sebaliknya. Pengukuran tersebut bersumber dari nilai demokrasi yang didapat pada tingkat provinsi di Indonesia. Sehingga, IDI sebenarnya bertujuan

untuk mengkuantifikasikan perkembangan dari demokrasi pada tingkat provinsi di Indonesia agar terjadi perencanaan pembangunan politik yang berkelanjutan di Indonesia sekaligus untuk menyelaraskan dengan otonomi daerah. Alasan lainnya dikarenakan oleh peristiwa-peristiwa demokrasi terjadi dan berlangsung di dalam lingkup unit politik daerah ini (Fajri et al., 2021). Manfaat dari IDI yaitu: 1) Memberikan data penting yang dapat dimanfaatkan untuk studi mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia karena tingkat perkembangan tersebut didasarkan atas data-data yang jelas dengan tolok ukur yang jelas pula, 2) Perencanaan pembangunan politik daerah, 3) Bagi Provinsi yang tingkat perkembangan demokrasiya kurang baik dapat menarik pelajaran dari data-data tersebut dengan memperhatikan indikator-indikator demokrasi yang mendapat nilai rendah. Pemerintah daerah dan masyarakat di provinsi bersangkutan secara bersama-sama dapat mengambil langkah-langkah tertentu yang dapat memperbaiki angka bagi indikator tersebut sehingga indeks bagi indikator itu bisa meningkat di masa yang akan datang (IDI, 2009).

Adapun yang dijadikan sebagai tolok ukur penilaian dari IDI yaitu sistem, mekanisme, dan prosedur (*procedural democracy*) maupun persolan-persolan yang bersifat substantif seperti kebebasan, keadilan, dan perilaku demokratik atau adab bernegara masyarakat (Fajri et al., 2021).. Ukuran-ukuran tersebut secara spesifik kemudian *breakdown* menjadi 3 (aspek), yaitu: Kebebasan Sipil, Hak-hak Politik, dan Lembaga Demokrasi. Ketiga aspek tersebut kemudian diukur lagi berdasarkan variabel dan variabel juga dibagi ke dalam indikator. Aspek Kebebasan sipil terdiri dari 4 variabel dan 10 indikator di dalamnya, Hak-hak politik terdiri dari 2 variabel dan 7 indikator, sedangkan Lembaga Demokrasi terdiri dari 5 variabel dan 11 indikator. Data penilaian IDI didapatkan dari berbagai metodologi antara lain *review* surat kabar, *review* dokumen, *Focus Group Discussion* (FGD) dan wawancara mendalam terhadap sejumlah informan terpilih yang dianggap memiliki pengetahuan yang layak (*well informed person*) terhadap hal-hal yang diukur di provinsi tempat mereka berdomisili. Data kemudian diolah sedemikian rupa untuk kemudian diskalatisasi 0 – 100 untuk mendapatkan angka yang kemudian dikategorikan menjadi <60 Buruk; 60-80 sedang; dan >80 baik. Adapun sampai tahun 2021 pengukuran terhadap IDI sudah dilakukan sebanyak 11 (sebelas) tahun.

Selama ini, banyak ahli ekonomi yang menganggap bahwa mekanisme pasar merupakan satu-satunya penggerak dalam perekonomian. Para pakar Ekonomi Kelembagaan menilai hal ini adalah sebuah kekeliruan karena peranan sebuah lembaga sangat penting dalam pembangunan ekonomi. Salah satu tokoh Ekonomi Kelembagaan yaitu Douglas C. North, membahas peranan penting suatu lembaga terhadap perekonomian dalam bukunya *Institutions, Institutional Change and Economic Performance* (1990). North (1990) mengungkapkan bahwa lembaga merupakan sebuah *rules of the game* atau aturan main di dalam masyarakat. Institusi adalah suatu alat yang digunakan manusia sebagai batasan dalam melakukan interaksi antar sesama manusia. Batasan yang dimaksud berupa tiga aturan; yaitu (1) formal rule atau aturan formal, yang terdiri atas sistem kontrak, undang-undang, hukum dan regulasi, (2) informal constraint atau batasan informal, yang terdiri atas konvensi, kepercayaan dan norma sosial serta budaya, dan (3) enforcement of both atau pemaksaan pematuhan terhadap keduanya, yang membentuk perilaku individu atau organisasi di masyarakat. Teori Kelembagaan muncul dengan menggunakan dasar kerangka pemikiran ekonomi neoklasik. Teori ekonomi neoklasik mengatakan bahwa yang mempengaruhi perekonomian hanyalah faktor-faktor input, yaitu; modal, tenaga kerja dan teknologi. Teori ekonomi neoklasik tidak mengangkat faktor endogen tentang kelembagaan, padahal kelembagaan diyakini menjadi faktor penting dalam mengatur seluruh mekanisme pasar. Oleh karena itu, Teori Kelembagaan muncul dengan mengedepankan pentingnya kelembagaan dalam mengatur batasan-batasan dan aturan dalam pembangunan ekonomi yang menjadi

tujuan utama setiap negara. Ali (2008) mengungkapkan kualitas sebuah lembaga akan menentukan pertumbuhan ekonomi. Lembaga yang lemah akan mengganggu pertumbuhan ekonomi karena menyebabkan agen ekonomi berkuat melawan sistem lembaga yang buruk daripada meneruskan aktivitas ekonomi. Lane dan Tornel (1996) meneliti tentang negara yang memiliki sumber daya alam melimpah tetapi memiliki kecenderungan pertumbuhan ekonomi yang rendah. Lane dan Tornel (1996) menemukan bahwa lemahnya lembaga menjadi salah satu penyebab mengapa negara-negara tersebut memiliki pertumbuhan yang rendah. Lembaga yang lemah tidak mampu melindungi hak kepemilikan sumber daya. Lembaga yang lemah juga menciptakan pemerintahan yang korup serta sistem yang tidak dapat dipercaya. Lemahnya perlindungan terhadap hak kepemilikan akan menghambat kemajuan teknologi. Hal ini sering terjadi pada negara-negara yang sedang berkembang.

Salah satu bentuk lembaga dalam sebuah negara adalah politik. Politik mempunyai pengaruh dalam perekonomian karena politik akan memberikan suatu batasan dan lingkungan pasar sebagai bentuk kontrol terhadap konsumen dan perusahaan (Drazen, 2000). Peranan politik dikaji lebih lanjut dalam sebuah cabang Ilmu Ekonomi yaitu Ekonomi Politik. Lionel Robins (1935) mengatakan bahwa ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam sebuah hubungan antara keterbatasan dan kelangkaan dengan berbagai alternatif yang dapat digunakan. Ekonomi Politik adalah sebuah studi tentang bagaimana pembuatan kebijakan mempengaruhi kebijakan dalam memutuskan sebuah pilihan dan mempengaruhi outcome perekonomian. Kebijakan ekonomi tidak ditentukan oleh social planner yang bebas kepentingan (benevolent), namun ditentukan oleh social planner yang memiliki berbagai kepentingan. Kebijakan ekonomi merupakan hasil dari sebuah proses yang menyeimbangkan konflik kepentingan antar berbagai agen tersebut.

Drazen (2000) menjelaskan bagaimana ketidakstabilan politik mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ketidakstabilan politik akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui sebuah institusi politik. Institusi politik menjadi tolok ukur keberhasilan pertumbuhan ekonomi karena institusi mengatur tentang; (1) property rights atau hak kepemilikan atas barang atau sumber daya yang dimiliki oleh individu maupun perusahaan, (2) pressure of redistribution atau kemampuan sebuah institusi untuk mengendalikan redistribusi pendapatan secara merata, dan (3) predatory dictator atau sistem pemerintahan yang diterapkan pada sebuah negara (sistem ditaktor maupun demokrasi). Kestabilan politik adalah hal yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi, hal tersebut dikarenakan kestabilan politik akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui sebuah institusi politi, dimana institusi politik akan menjadi indikator keberhasilan pertumbuhan ekonomi. Institusi bertugas untuk mengatur tentang hak milik seseorang atas barang dan jasa, mengatur dan mengendalikan redistribusi pendapatan secara merata serta sistem pemerintahan yang diterapkan pada sebuah negaranya yaitu negara demokrasi. Drazen (Septiani, 2014).

### **Pengangguran**

Menurut Suparmoko (2007) pengangguran adalah ketidak mampuan angkatan kerja untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan yang mereka butuhkan atau mereka inginkan. Jadi dapat disimpulkan pengangguran adalah suatu kondisi di mana seseorang yang sudah tergolong angkatan kerja belum mendapat pekerjaan dan berusaha mencari pekerjaan. Sedangkan menurut Badan Pusat Statisitk (BPS) dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran merupakan penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Menurut Murni (2006) pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan atau tidak mempunyai penghasilan. Sukirno

(2008) menjelaskan pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tapi belum dapat memperolehnya.

### Gini Ratio

Ketimpangan pendapatan merupakan distribusi yang tidak proporsional dari pendapatan nasional total di antara berbagai rumah tangga dalam suatu negara (Todaro, 2011:254). Teori disparitas pendapatan wilayah dikemukakan oleh Jeffrey G. Williamson yang meneliti hubungan antara disparitas regional dan tingkat pembangunan ekonomi dengan menggunakan data ekonomi negara yang sudah maju dan yang sedang berkembang. Ditemukan bahwa selama tahap awal pembangunan, disparitas regional menjadi lebih besar dan pembangunan ekonomi terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu. Pada tahap yang lebih “matang”, dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tampak adanya keseimbangan antardaerah dan disparitas berkurang dengan signifikan (Kuncoro, 2004:133). Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang perlu dilihat karena pada dasarnya merupakan ukuran kemiskinan relatif. Ada dua kategori tingkat kemiskinan yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah kondisi di mana tingkat pendapatan seorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. Kemiskinan relatif adalah perhitungan kemiskinan berdasarkan proporsi distribusi pendapatan daerah (Sukino, 2013). Distribusi pendapatan nasional adalah mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara di kalangan penduduknya (Dumairy, 1999). Distribusi pendapatan dibedakan menjadi dua ukuran pokok yaitu distribusi ukuran adalah besar atau kecilnya bagian pendapatan yang diterima masing-masing orang dan distribusi fungsional atau distribusi kepemilikan faktor faktor produksi (Todaro, 2000). Dari dua definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa distribusi pendapatan mencerminkan ketimpangan atau meratanya hasil pembangunan suatu daerah atau negara baik yang diterima masing-masing orang ataupun dari kepemilikan faktor-faktor produksi dikalangan penduduknya. Ketimpangan pendapatan lebih besar terjadi di negara-negara yang baru memulai pembangunannya, sedangkan bagi negara maju atau lebih tinggi tingkat pendapatannya cenderung lebih merata atau tingkat ketimpangannya rendah. Terdapat beberapa metode/teknik untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan, diantaranya yaitu:

1. Kurva Lorenz: Kurva Lorenz menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan nasional di kalangan lapisan-lapisan penduduk. Kurva ini terletak di dalam sebuah bujur sangkar yang sisi tegaknya melambangkan persentase kumulatif pendapatan nasional, sedangkan sisi datarnya mewakili persentase kumulatif penduduk. Kurvanya sendiri ditempatkan pada diagonal utama bujur sangkar tersebut. Kurva Lorenz yang semakin dekat ke diagonal (semakin lurus) menyiratkan distribusi pendapatan nasional yang semakin merata. Sebaliknya, jika kurva Lorenz semakin jauh dari diagonal (semakin lengkung), maka ia mencerminkan keadaan yang semakin buruk, distribusi pendapatan nasional semakin timpang dan tidak merata.
2. Gini Ratio: Gini Ratio digunakan untuk melihat adanya hubungan antara jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh keluarga atau individu dengan total pendapatan. Ukuran Gini Ratio sebagai ukuran pemerataan pendapatan mempunyai selang nilai antara 0 sampai dengan 1. Bila Gini Ratio mendekati nol menunjukkan adanya ketimpangan yang rendah dan bila Gini Ratio mendekati satu menunjukkan ketimpangan yang tinggi (Todaro, 2000). Rumus untuk menghitung Gini Ratio adalah sebagai berikut:  $GR = 1 - \sum (Y_i + Y_{i-1})$   
Dimana:  
 $F_i$  = jumlah persen (%) penerima pendapatan kelas ke-i

$Y_i$  = jumlah kumulatif (%) pendapatan pada kelas ke- $i$

Nilai Gini antara 0 dan 1, dimana nilai 0 menunjukkan tingkat pemerataan sempurna, dan semakin besar nilai Gini maka semakin tidak sempurna tingkat pemerataan pendapatan. Yang artinya semakin tinggi tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di wilayah tersebut. Kriteria ketimpangan bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Nilai Koefisien	Kriteria Distribusi Pendapatan
< 0.4	Tingkat ketimpangan rendah
0.4 – 0.5	Tingkat ketimpangan sedang
>0.5	Tingkat ketimpangan tinggi

### Hipotesis

1. Diduga Indeks Demokrasi Indonesia Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara Tahun Amatan 2015-2022
2. Diduga Tingkat Pengangguran berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara Tahun Amatan 2015-2022
3. Diduga Gini Ratio Berpengaruh Negatif dan Signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara Tahun Amatan 2015-2022
4. Diduga Indeks Demokrasi Indonesia, Pengangguran dan Gini Ratio secara Bersama sama Signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara Tahun Amatan 2015-2022

### METODE PENELITIAN

Bagian ini menguraikan metode yang digunakan peneliti untuk menjelaskan pengaruh sistematika penelitian. Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus dengan menggunakan metode kuantitatif. Pengertian penelitian studi kasus menurut Arikunto (2002) adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap organisasi, lembaga atau gejala tertentu. Sedangkan penelitian kuantitatif menurut Indriantoro dan Soepomo (2002) adalah penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Data Dalam penelitian ini, data-data yang digunakan adalah jenis data sekunder deskriptif kuantitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dikarenakan mengacu pada perhitungan analisis data penelitian yang berupa angka angka atau pernyataan pernyataan yang dinilai dan analisis dengan analisis statistik. Data kuantitatif terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia, Pengeluaran Pemerintah, Jumlah Penduduk, dan Gini Ratio Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang analisis datanya bersifat kuantitatif (Sugiyono, 2012). Penelitian ini di maksudkan untuk mengetahui pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Jumlah Penduduk, dan Gini Ratio terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan data time series pada tahun 2015 –2022. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu Indeks Pembangunan Manusia dalam satuan persent, jumlah penduduk dalam satuan jiwa, jumlah pengeluaran pemerintah dalam satuan milyarad Rupiah dan Gini Ratio dalam satuan persen di Provinsi Sumatera utara yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara sumber lain yang berhubungan untuk memperoleh data sekunder dengan alat analisis yang digunakan Eviews 10.

### Metode Analisa Regeresi Berganda

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda yang diolah dengan bantuan program Eviews 10. Secara umum persamaan regresi linear berganda yang digunakan penelitian ini sebagai berikut:

$$Y_t = a + b_1X_{1t} + b_2X_{2t} + b_3X_{3t} + e_t$$

Keterangan:

- Y = Laju Pertumbuhan Ekonomi
- A = Konstanta
- b1 = Koefisien Regresi Indeks Demokrasi Indonesia
- X1 = Indeks Demokrasi Indonesia
- b2 = Koefisien Regresi Pengangguran
- X2 = Pengangguran
- b3 = Koefisien Regresi Gini Ratio
- X3 = Gini Ratio
- t = 1,2,3.....8 (time series 2015-2022)
- e = Faktor pengganggu di luar model (error)

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

**Table.1 Hasil Uji Asumsi dan Uji Regresi Model Least Squares**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	192.6591	28.89596	6.667335	0.0011
IDI	0.279764	0.051754	5.405607	0.0029
LOG(PGR)	-18.56790	2.141725	-8.669600	0.0003
GR	101.2016	30.39783	3.329237	0.0208
R-squared	0.946176	Durbin-Watson stat		2.344750
F-statistic	29.29820	Prob(F-statistic)		0.001343
<b>Asumsi Klasik:</b>				
Normality	Jarque-Bera Probability			0,9414
Heteroskedasticity Test	Prob. Chi Square(3)			0.0545
<b>Multikolinearitas:</b>				
<b>IDI</b>	Centered Variance Inflation Factors			1.5410
<b>PGR</b>	Centered Variance Inflation Factors			1.2873
<b>GR</b>	Centered Variance Inflation Factors			1.2683

#### Hasil Uji Asumsi Klasik

- a. Uji Normalitas. Dari hasil analisis, nilai Prob. *Jarque Bera (JB)* > 0,05 artinya tidak terjadi penyimpangan asumsi normalitas atau data terdistribusi secara normal. Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa Prob. Jarque Bera sebesar 0,9414 > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi pelanggaran uji normalitas dalam model penelitian ini.
- b. Uji Heteroskedastisitas. Hasil uji *Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey* dengan kriteria nilai Obs\*R-Squared > 0,05 berarti tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model penelitian ini. Berdasarkan tabel 1. Dapat diketahui bahwa nilai Prob. Sebesar 0,0545, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi pelanggaran uji heteroskedastisitas dalam model penelitian ini
- c. Uji Autokorelasi. Hasil uji *Autokorelasi* dengan kriteria nilai  $du < dl < DW < 4-dl < 4-du$  dari 4- dalam model penelitian ini. Berdasarkan tabel 1. Dapat diketahui bahwa nilai DW. Sebesar 2,344750, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi pelanggaran uji Autokorelasi dalam model penelitian ini.
- d. Uji Multikolinearitas. Hasil uji *Variance Inflation Factors* dengan kriteria nilai Centered VIF < 10, berarti tidak terjadi pelanggaran uji multikolinearitas dalam model penelitian ini. Berdasarkan Tabel 1. dapat diketahui bahwa nilai Centered VIF IDI sebesar 1,5410 < 10, Pengangguran sebesar 1,2873 < 10, dan Gini Ratio sebesar 1,2683 < 10 sehingga dapat

disimpulkan bahwa tidak terjadi pelanggaran uji multikolinearitas dalam model penelitian ini.

### Uji Hipotesis

#### Uji Simultan

Berdasarkan Tabel 1. Dapat diketahui bahwa nilai Prob(F-statistic) sebesar  $0.001343 < 0.05$  menunjukkan bahwa variabel Indeks Demokrasi Indonesia (X1), Pengangguran (X2) dan variable Gini Ratio (X3) secara simultan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel Laju Pertumbuhan Ekonomi (Y), maka  $H_0$  diterima.

#### Uji Parsial (uji t)

Berdasarkan pengujian regresi secara parsial diatas menunjukkan bahwa:

1. variabel Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) berpengaruh positif dan signifikan terhadap LPE di Provinsi Sumatera Utara. variabel IDI dengan t hitung sebesar 5.405607 dan t tabel sebesar 2,57058, t hitung > t table ( $5.405607 > 2,57058$ ) atau nilai signifikan lebih kecil dari alpa 0.05 % ( $0.0029 < 0,05$ ).
2. variabel Pengangguran (PGR) terhadap LPE di Provinsi Sumatera Utara. variabel (PGR) berpengaruh negatif dan signifikan dengan t hitung sebesar 8.669600 dan t tabel sebesar 2,57058, t hitung > t table ( $8.669600 > 2,57058$ ) atau nilai signifikan lebih kecil dari alpa 0.05 % ( $0.0003 < 0,05$ ).
3. Variabel Gini Ratio berpengaruh (GR) dengan arah positif terhadap LPE di Provinsi Sumatera Utara. variabel Gini Ratio dengan t hitung sebesar 3.329237 dan t tabel sebesar 2,57058, t hitung < t table ( $3.329237 < 2,57058$ ) atau nilai signifikan lebih besar dari alpa 0.05 % ( $0.0208 > 0,05$ ).

#### Koefisien Determinasi

Berdasarkan Tabel 1. Dapat diketahui bahwa nilai R-squared sebesar 0.946176 menunjukkan bahwa variabel Indeks Demokrasi Indonesia (X1), Pengangguran (X2) dan variable Gini Ratio (X3) memberikan pengaruh secara simultan terhadap variabel LPE (Y) sebesar 94,6176%, dan sisanya sebesar 5,3824% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini.

### Pembahasan

#### Variabel Indeks Demokrasi Indonesia Terhadap LPE di Provinsi Sumatera Utara

Hasil analisis data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia berpengaruh positif dan signifikan terhadap LPE di Sumatera Utara tahun 2014-2022, yang artinya hipotesis pengaruh Indeks Demokrasi Indonesia terhadap LPE di Sumatera Utara dapat diterima dan teruji kebenarannya. Penelitian ini juga selaras dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (ANDIKA PARADIPTA, 2019) yang memiliki hasil Demokrasi berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi secara statistic. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan (LATHIF, 2019) yang mengatakan bahwa Pengaruh indeks demokrasi Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2013-2017 adalah positif dan signifikan, apabila tingkat IDI di Indonesia meningkat maka akan mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Berdasarkan hasil regresi panel, maka hipotesis keempat diterima. Sama hal yang dengan hasil penelitian yang dilakukan (Zahidaluthfa Milla, 2018) mengatakan Kestabilan Politik di Indonesia yang digambarkan dengan data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2011-2016 memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal itu menunjukkan bahwa apabila tingkat

kestabilan politik meningkat maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat juga. Dapat disimpulkan bahwa apabila nilai IDI naik sebesar 1 persen maka nilai PDRB akan meningkat sebesar 0.004713, begitupun sebaliknya apabila nilai IDI turun sebesar 1 persen maka nilai PDRB akan turun sebesar 0.004713.

### **Variabel Pengangguran Terhadap LPE di Provinsi Sumatera Utara**

Hasil analisis data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap LPE di Sumatera Utara tahun 2014-2022, yang artinya hipotesis pengaruh Pengangguran terhadap LPE di Sumatera Utara dapat diterima dan teruji kebenarannya. Penelitian ini juga selaras dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Kalsum, 2017) bahwa Variabel pengangguran memiliki nilai signifikan sebesar 0.010 lebih kecil dari 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa pengangguran berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil t-hitung pada tabel diatas menunjukkan -2,593 dengan ttabel sebesar 2,89. Artinya t-hitung lebih kecil dari t-tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengangguran berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penjelasan diatas membuktikan bahwa pengangguran menunjukkan penurunan terhadap pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya. Demikian juga dengan penelitian yang dilakukan (Septiatin et al., 2016) bahwa pengangguran berpengaruh signifikan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan uji t yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar  $0,0191 < \alpha (0,05)$ . Hasil menunjukkan bahwa koefisien regresi pengangguran sebesar 1,385062, hal ini menunjukkan jika tingkat pengangguran meningkat 1%, sedangkan variabel inflasi tetap maka tingkat pertumbuhan ekonomi (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 1,385062%.

### **Variabel Gini Ratio Terhadap LPE di Provinsi Sumatera Utara**

Hasil analisis data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Gini Ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap LPE di Sumatera Utara tahun 2014-2022, yang artinya hipotesis pengaruh Gini Ratio terhadap LPE di Sumatera Utara dapat diterima namun dengan arah yang berbeda dan teruji kebenarannya. Penelitian ini juga sejalan dengan tinjauan pustaka yang dilakukan dalam penelitian, sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Rahmadi, 2019) bahwa pengaruh ketimpangan pendapatan yang diukur melalui gini ratio dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Maluku Dan Papua, model estimasi terbaik berdasarkan Uji Chow dan Uji Hausman adalah model Fixed Effect. Hasil Uji Chow : nilai probabilitas  $0,0000 < 0,05$  atau signifikan pada  $\alpha = 5\%$  dan  $F_{statistik} = 51.386196 > F_{tabel} = 3,63$ . Artinya  $H_1$  diterima, begitu juga dengan hasil penelitian yang dilakukan (Adib, 2019) bahwa Dari hasil analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini ditemukan bahwa Indeks Gini berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 33 Provinsi di Indonesia. Keadaan ini terjadi karena orang-orang kaya memiliki rasio tabungan yang lebih tinggi dari pada orang-orang miskin sehingga akan meningkatkan aggregate saving rate yang diikuti oleh peningkatan investasi sebagai modal pembangunan yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan hasil analisis yang telah diuraikan sebelumnya, serta mengacu pada data output hasil analisis secara parsial dan penelitian-penelitian terdahulu pada penelitian ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan: Indeks Demokrasi Indonesia Berpengaruh positif dan signifikan terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi di provinsi Sumatera Utara tahun 2014-2022. Hasil analisis ini menunjukkan t hitung  $> t$  table ( $5.405607 > 2,57058$ ) atau nilai signifikan lebih kecil dari  $\alpha 0.05\%$  ( $0.0029 < 0,05$ ). Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi di provinsi Sumatera

utara tahun amatan 2014-2022. Hasil analisis ini menunjukkan  $t$  hitung  $>$   $t$  table ( $8.669600 > 2,57058$ ) atau nilai signifikan lebih kecil dari  $\alpha$  0.05 % ( $0.0003 < 0,05$ ). Gini Ratio Berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pemabangunan manusia di provinsi sumatera utara tahun amatan 2015-2022. Hasil analisis ini menunjukkan  $t$  hitung  $<$   $t$  table ( $3.329237 < 2,57058$ ) atau nilai signifikan lebih besar dari  $\alpha$  0.05 % ( $0.0208 > 0,05$ ).

Saran: Diharapkan kepada pemerintah untuk berupaya semaksimal mungkin melakukan pencegahan sehingga tidak lagi terjadi penyelewengan kekuasaan terutama terkait penyelewengan terhadap anggaran baik dalam pembahasan maupun terhadap pelaksanaannya. Pemerintah daerah dinilai perlu mengambil kebijakan yang berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan cara memperluas lapangan kerja, penyediaan infrastruktur ekonomi yang lebih baik serta meningkatkan investasi. Pemerintah harus melakukan investasi yang bersipat padat karya agar menyerap tenaga keerja yang nantinya akan mengurai jumlah pengangguran. Disarankan untuk penelitian selanjutnya sebagai bahan acuan penulis dalam melakukan penelitian mengenai Indeks Demokrasi Indonesia, Pengangguran dan Indeks Gini terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sehingga dapat memberikan masukan yang lebih lengkap.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adib, I. mikaTriani. (2019). Analisis Pengaruh Demokrasi , Indeks Gini dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia
- Andika Paradipta. (2019). Pengaruh Utang Pemerintah Dan Demokrasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia
- Boediono. 1994. Teori Pertumbuhan Ekonomi. Edisi 1. Yogyakarta: BPFE.
- Drazen, A. 2000. Political Economy in Macroeconomics. Princeton: Princeton University Press
- Fajri, H., Wahyuni, N., Boni Saputra, & Maani, K. Dt. (2021). Demokrasi Pincang: Analisis Terhadap Indeks Demokrasi Provinsi Sumatera Barat Pasca Reformasi. Jurnal El-Riyasah, 12, 108-128
- Kalsum, U. (2017). Pengaruh Pengangguran Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Utara.
- Kuncoro, Mudrajad. "Otonomi dan Pembangunan Daerah", Erlangga: Jakarta,2004
- LATHIF, F. A. (2019). Pengaruh Variabel Ekonomi.
- Murni Asfia. 2006. Ekonomika Makro. Bandung, Refika Aditama
- North, D.C. (1990). Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge university press.
- Parkin, Michael. 2010. Macroeconomics, 10th Ed.. Boston: Addison-Wesley (Pearson).
- Rahmadi, S. (2019). Pengaruh ketimpangan pendapatan dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi antar pulau di Indonesia. In Jurnal Paradigma Ekonomika 14(2)
- Septian, P.D., & Farah, A. (2014). Pertumbuhan Ekonomi dan Kestabilan Politik di Indonesia. Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- Septiatin, A., MAde Khairur Rizki, dan, & Ade Khairur Rizki, M. (2016). Pengaruh Inflasi Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia (Vol. 2, Issue 1).
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B. Bandung: Alfabeta
- Sukirno, Sadono. 2008. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta
- Suparmoko, 2007. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: Andi Offset
- Supomo, Bambang dan Indriantoro, Nur. 2002. Metodologi Penelitian Bisnis. Yogyakarta: Penerbit BPFE UGM
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. "Pembangunan Ekonomi", Edisi
- Zahidaluthfa Milla. (2018). Analisis Pengaruh Variabel Ekonomi dan Politik Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia